

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Jakarta Baru Terserap 24 Persen

**Akibat perencanaan yang tidak matang serta lelang yang berulang.**

**Linda Hairani**

*linda.hairani@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Memasuki akhir semester pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta baru terserap sekitar 24,44 persen dari rencana belanja total Rp 77,16 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuding perencanaan yang tidak matang sebagai penyebab rendahnya realisasi belanja anggaran tersebut. "Penyerapan selalu

dibebankan di triwulan terakhir," kata dia, kemarin.

Sandiaga menyebutkan target serapan anggaran yang dibuat sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ibarat "loncat hoki". Kurva serapan anggaran cenderung datar hingga triwulan ketiga. Pada triwulan terakhir, kurvanya lalu melonjak ke angka 100 persen.

Dalam situs *publik.bapedadki.net*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, misalnya, menargetkan serapan

anggaran 0,05-12,85 persen sepanjang Januari-November tahun ini. Dinas ini baru menargetkan anggaran terserap 100 persen pada Desember.

Menurut Sandiaga, penyusunan target waktu pembangunan sejumlah infrastruktur di Jakarta tak dihitung dengan cermat. Contohnya, program yang seharusnya menggunakan anggaran tahun jamak dibuat menjadi anggaran tahun tunggal.

Dari sekian banyak instansi, serapan angga-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Jakarta Baru Terserap 24 Persen

ran Dinas Sumber Daya Air DKI tergolong paling rendah. Hingga kemarin, serapan belanja modalnya baru Rp 116,4 miliar atau 4,3 persen dari Rp 2,7 triliun. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Herdarwan, mengatakan serapan anggaran rendah lantaran terganjal pelepasan lahan untuk normalisasi sungai. "Ini berulang sejak 2015," kata dia.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengungkapkan penyerapan anggaran juga rendah karena banyak lelang yang diulang. Kegagalan lelang terjadi lantaran sejumlah SKPD tak siap memenuhi polbagai persyaratan, seperti rincian kegiatan dan indikator kinerja, studi kelayakan dan *detailed engineering design*, serta kesiapan lokasi atau lahan.

Perencanaan yang tak matang, menurut Blessmiyanda, juga ditandai oleh survei pasar yang baru digelar pada tahun yang sama saat program dianggarkan. Survei pasar memotong waktu pelaksanaan, terutama pada program anggaran tahun tunggal. "Sebaiknya semua persiapan dilakukan setahun sebe-

lum program dianggarkan," kata dia.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Sandiaga meminta dinas, biro, serta badan pemerintahan DKI menyisir semua program mereka. Program anggaran tahun tunggal yang belum dilelang sampai menjelang pembahasan APBD 2018 Perubahan akan dicoret. Dalam dokumen APBD Perubahan, anggaran program yang dicoret akan menjadi nol. "Agar tak membebani serapan anggaran, ketimbang programnya tetap ada tapi tak terlaksana," ujar dia. Sandiaga pun membentuk tim memantau serapan anggaran yang akan mengadakan rapat tiap dua pekan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, juga menyoroti serapan anggaran yang rendah. Di tengah serapan anggaran yang rendah, Prasetyo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mempertimbangkan masak-masak rencana penggantian para pejabat SKPD. "Kalau semuanya berpikir soal pergantian orang, jadinya tak enak bekerja," kata dia.

● LINDA HARANI

## Terseok di Semester Pertama

Serapan anggaran sejumlah dinas DKI dengan alokasi terbesar pada semester pertama tahun ini umumnya masih rendah. Sejalan ini, belum ada dinas dengan serapan belanja modal (program pembangunan) melebihi 20 persen. Berikut ini daftarnya:

Dinas	Alokasi Belanja Modal	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (Persen)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,47 triliun	270,7 miliar	10,96
Dinas Kehutanan	2,06 triliun	265,5 miliar	12,86
Dinas Sumber Daya Air	2,71 triliun	116,49 miliar	4,30
Dinas Bina Marga	1,68 triliun	90,78 miliar	5,40
Dinas Pendidikan	2,52 triliun	86,5 miliar	3,4
Dinas Kesehatan	146,36 miliar	2,17 miliar	1,4
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	175,16 miliar	88 juta	0,04

SUMBER: TUGAS DAHUK, SURVEI

● LINDA HARANI